



Warga Dusun Krecek dan Gletuk, Desa Getas, Kaloran, Temanggung, melakukan tradisi Sadranan.

KR-Zaini Arrosyid

## UNTUK PIDANA KORUPSI

# Denda Damai Tak Bisa Diterapkan

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi (tipikor). Penerapan denda damai tertera dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Pasal itu menyebutkan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat mengu-

nakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Hari Siregar menjelaskan, berdasarkan pasal tersebut, denda damai hanya diterapkan untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian tipikor, men-

gacu pada Undang-Undang Tipikor.

"Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi," jelas Hari, seraya menegaskan, penghentian perkara di luar pengadilan melalui denda damai hanya untuk perkara-perkara yang telah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung. (Ant/Has)-d

## PSS Sukses

PSS lebih berhati-hati dalam mengalirkan bola. Peluang pertama didapat Nicolao Cardoso pada menit ke-8. Namun, sepakan keras kaki kiri Cardoso bisa ditepis Aditya Harlan, penjaga gawang Madura United FC. Tiga menit kemudian, PSS mencetak gol keunggulan.

Berawal dari tendangan bebas Kevin Gomes, ia mengarahkan bola ke tiang jauh dan sukses disambar Cleberson dengan sundulan. Bola sempat ditepis Aditya Harlan, namun bola yang begitu keras meluncur deras masuk ke gawang Madura United FC. Tuan rumah unggul 1-0.

PSS hampir mendapatkan hadiah penalti menit 19, namun setelah wasit meninjau VAR, penalti bagi PSS dibatalkan karena Gustavo Tocantins dianggap sengaja menjatuhkan diri saat perebutan bola dengan pemain Madura United FC.

Menit 30, upaya PSS mencetak gol pengganda digagalkan mistar gawang.

Tandukan Gustavo Tocantins saat menerima umpan silang Abduh Lestaluhe membentur mistar. Setelahnya, tim tamu menyerang bertubi-tubi pertahanan PSS. Cleberson cs tetap fokus dan sigap menutup ruang tembak pemain Madura United FC hingga tak ada peluang yang bisa dimaksimalkan.

PSS benar-benar menggandakan keunggulan pada menit ke-36. Berawal dari sepak pojok,antisipasi pemain Madura United FC mengarah pada Dominikus Dion yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Ia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke gawang Madura United FC. Laskar Sembada memimpin 2-0 di babak pertama.

Babak kedua, PSS masih mendominasi permainan. Danilo Alves mencetak namanya di papan skor menit 59. Memanfaatkan umpan manis Achmad Figo dari sisi kiri pertahanan Madura

United, Danilo Alves menyambar bola dengan tandukan terarah. PSS memperlebar jarak jadi 3-0.

Tak cukup dengan keunggulan tiga gol, PSS masih ngegas. Giliran Gustavo Tocantins mencetak gol menit ke-65. Umpan terobosan Achmad Figo dikonversi dengan apik oleh Gustavo Tocantins lewat tendangan kaki kanan mendarat. Bola meluncur deras ke pojok kanan gawang Madura United FC. Skor berubah jadi 4-0.

Beberapa kali, PSS masih terus mencoba menambah gol di akhir laga. Gustavo Tocantins mencetak gol keduanya, tapi dianulir karena Irkham Mila yang memberikan umpan lebih dahulu dalam posisi *offside*. Setelahnya, Achmad Figo mendapatkan kesempatan, tapi bola bisa ditepis Aditya Harlan. PSS pun menutup putaran pertama dengan kemenangan 4-0. (Yud)-f

## Raturan

Yakusa (Yakin Usaha Sampai), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Jakarta Raya dan Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI). Spanduk bertuliskan "Tolak PPN 12%" dan "Menolak Kenaikan PPN" menjadi simbol utama

perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dampak negatif PPN 12 persen terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat, teruta-

ma di tengah masa pemulihan ekonomi pascapandemi. "PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut. (Ant/Has)-f

## 'Crazy Rich

dan orang lain. Untuk yang meringankan, terdakwa Budi Said belum pernah dihukum. Selain itu, bersifat sopan di persidangan, dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta memiliki tanggung jawab keluarga.

Vonis yang dijatuhkan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, terdakwa Budi Said dituntut pidana penjara selama 16 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa

pembayaran uang pengganti sebesar 58,13 kg emas Antam atau Rp 35,07 miliar dan 1.136 kg emas Antam atau senilai Rp 1,07 triliun subsidi pidana penjara 8 tahun.

Perbuatan korupsi diduga dilakukan dengan menerima selisih lebih emas Antam sebesar 58,13 kg atau senilai Rp 35,07 miliar yang tidak sesuai dengan faktur penjualan emas dan tidak ada pembayarannya kepada Antam. Selain itu, terdapat kewajiban kekurangan ser-

ah emas Antam dari Antam kepada Budi sebanyak 1.136 kilogram berdasarkan putusan MA Nomor 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022.

Pada sidang yang sama, mantan General Manager (GM) PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena divonis pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 500 juta subsidi pidana kurungan tiga bulan terkait kasus korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk. (Ful)-f

## Makan

yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan perekonomian, telah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Amerika Serikat. Sekitar 30 juta anak sekolah Amerika mendapat manfaat dari program ini, yang menimbulkan biaya tahunan sekitar 18,7 miliar dolar AS. Program ini menghasilkan keuntungan kesehatan dan ekonomi sebesar 40 miliar dolar AS, sehingga menghasilkan keuntungan sekitar 21 miliar dolar AS. Program ini bertujuan untuk meringankan kekhawatiran siswa mengenai kebutuhan dasar agar mereka dapat berkonsentrasi pada kegiatan akademis.

Namun makan bergizi gratis juga memiliki potensi ancaman dalam bentuk makanan bersisa (food waste) di dunia pendidikan. Potensi ancaman ini berasal dari penerima manfaat langsung yaitu anak-anak dengan latar usia pendidikan dasar (elementary), menengah (secondary) dan atas (upper). Segmen masyarakat dengan perilaku konsumsi unik dan rentan melakukan food waste. Artinya, potensi ancaman food waste seharusnya diantisipasi. Jika tidak, dikhawatirkan dalam dunia pendidikan menyandang predikat baru sebagai produsen food waste.

Program makan bergizi gratis, meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak didik dan ibu hamil, juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif jika tidak direncanakan dan dilak-

sanakan dengan tepat dan benar. Lebih jauh, program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran besar serta berkelanjutan. Jika tidak ada alokasi anggaran yang jelas atau jika anggaran tersebut bersumber dari pemotongan anggaran sektor lainnya, ini dapat menambah beban keuangan negara dan berdampak ketidakseimbangan anggaran.

Yang lebih ironis adalah tantangan dalam hal transparansi dan pengelolaan keuangan juga bisa menimbulkan masalah. Indikasi ini jika tanpa pengawasan yang maksimal, program ini bisa rentan terhadap korupsi atau penyalahgunaan anggaran, yang akan mengurangi efektivitas dan kualitas makanan yang disediakan. Risiko yang lebih besar adalah terkait kualitas dan kandungan gizi makanan yang disediakan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Alhasil, program ini tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan anak didik dan ibu hamil.

Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan janji mereka untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya sekadar retorika politik, tetapi juga bagian integral dari program dan visi misi mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka meng-

garisbawahi komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi di Indonesia.

Latar belakang janji ini dapat dipahami dalam konteks tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, terutama di tengah pandemi global dan ketidakpastian ekonomi yang terkait. Krisis ekonomi telah meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Indonesia. Banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan. Dalam situasi ini, janji untuk menyediakan makan siang gratis menjadi sebuah respons yang tanggap dan proaktif untuk mengatasi kebutuhan mendasak masyarakat Indonesia.

Jika program makan bergizi gratis berskala besar dilaksanakan, kemungkinan besar akan mengurangi permintaan terhadap produk makanan di sektor swasta, terutama di daerah yang biasanya bergantung pada penjualan makanan ke sekolah-sekolah atau komunitas. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sangat penting, termasuk dengan pengawasan, evaluasi, serta program pendukung untuk meningkatkan kemandirian gizi masyarakat dalam jangka panjang. Semoga! □-f

(Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta)

# 'Nyadran Perdamaian' Lestarian Kerukunan dari Leluhur

TEMANGGUNG (KR) - Kabut tipis perlahan berlalu dihembus angin, dan langit fajar tampak masih malu-malu menampakkan semburatnya, saat warga Dusun Krecek dan Gletuk, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai datang di kompleks Pemakaman Gletuk untuk menggelar tradisi Nyadran.

Tradisi Nyadran yang dihadiri semua unsur agama dan kelompok kepercayaan dihelat tiap Jumat Pon, 25 Jumadilakhir Penanggalan Jawa, yang pada tahun ini bertepatan 27 Desember 2024.

Tradisi ini telah digelar sejak nenek moyang di kompleks Pemakaman Gletuk yang merupakan tempat dimakamkannya leluhur warga Dusun Krecek dan Gletuk. Sejak tahun 2019, tradisi Nyadran itu dinamai Nyadran Perdamaian.

Kepala Desa Getas Dwiyanto mengatakan, Nyadran merupakan tradisi mengingat jasa baik para leluhur yang telah meninggal dan kemudian mendoakan bersama, berdasar agama dan kepercayaan yang dianut warga. "Spirit positif atau hal yang baik dari nenek moyang terus dilestarikan, ini demi kebaikan dalam kelangsungan kehidupan saat ini dan anak cucu ke depan," katanya.

Dikatakan, nilai baik yang harus dilestarikan seperti mencintai alam semesta, kegotongroyongan, kebersamaan, ketaatan pada agama dan kepercayaan. "Hubungan dua dusun yang merupakan satu leluhur juga harus terus direkatkan," ujarnya.

Menurut Dwiyanto, berbagai sesajian untuk dimakan bersama di kompleks Pemakaman sebagai tanda syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kebersamaan dari warga.

Sebagai Kepala Desa, Dwiyanto berharap tradisi Nyadran dapat terus dilestarikan. Banyak manfaat yang didapat dari Nyadran, di antaranya pertemuan masyarakat untuk saling menyapa, bertukar kabar dan informasi dan saling mempererat tali persaudaraan.

Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Kholifah mengatakan, Nyadran Perdamaian tahun ini sebagai hal istimewa yakni untuk merenung apa yang telah dilakukan dalam satu tahun terakhir dan merencanakan target satu tahun ke depan.

Ruby menerangkan, AMAN Indonesia merupakan sebuah gerakan untuk memperkuat peran perempuan pada perdamaian dan Nyadran Perdamaian merupakan sebuah misi menjaga kerukunan di masyarakat. (Osy)-f

## POLISI PERAS WNA PENONTON DWP DPR Minta Dipecat dan Dihukum Berat

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta para polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat. Hal itu karena mereka sudah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

"Para pelaku sudah mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional, karena yang mereka peras bukan warga Indonesia, tapi warga Malaysia," kata Hasbi dalam keterangannya, Jumat (27/12).

Menurutnya, 18 polisi yang memeras 45 warga negara Malaysia saat konser DWP di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024, bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi sudah merusak citra Indonesia di mata dunia. Masyarakat internasional akan menganggap bahwa Indonesia, khususnya polisi adalah tukang peras dan tidak bermoral, padahal pemerasan itu hanya dilakukan sejumlah oknum polisi, bukan Polri secara lembaga.

## Belasan

"Warga yang mau mendekati ke lokasi kebakaran, kami cegah agar memudahkan Damkar ke lokasi," ujar Rully.

Rully juga meminta warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kebakaran jangan panik, yang penting tetap waspada. Sementara tokoh nelayan Tegal, Tambari Ghultom, saat ditanya KR mengatakan, hampir tiap tahun terjadi kebakaran di pelabuhan tersebut, namun selama ini belum ada pihak yang bertanggung jawab.

## Biaya

"Hal yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situ lah baru diputuskan berapa biaya haji," ucap Syafii.

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemandokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

"Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji

Hasbi pun menilai kasus pemerasan warga negara Malaysia itu menjadi ujian berat bagi Polri. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo harus bertindak tegas dan cepat menyelesaikan kasus tersebut. "Polri harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka tegas kepada anggotanya yang melanggar. Dan itu harus dilakukan dengan cepat," ujarnya.

Para pelaku pemerasan harus dihukum seberat-beratnya. Mereka sudah melakukan tindak pidana pemerasan kepada warga Malaysia. Mereka harus dijatuhi hukuman pidana. Adapun tindak pidana pemerasan sudah diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain saksi pidana, para pelaku pemerasan juga bisa disanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), karena mereka sudah melakukan pelanggaran berat. "Polri harus bergerak cepat menuntaskan kasus yang dilakukan para anggotanya. Kasus ini sedang menjadi sorotan dunia internasional," tambah Hasbi. (Ant/Has)-d

## Sambungan hal 1

"Kapal tambat *kan* ada biayanya, harusnya pihak pengelola pelabuhan ikut tanggung jawab atas kebakaran kapal yang kerap terjadi," ujar Tambari.

Menurutnya, untuk meminimalisir kebakaran kapal, seharusnya ada Hydran alat penyemprot yang dipasang di beberapa titik di sekitar kolam pelabuhan. "Rata-rata harga kapal sekitar Rp 4-5 miliar dan yang terbakar sampai sekarang sudah lebih dari 10 unit," ucap Tambari. (Ryd)-f

## Sambungan hal 1

dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," ujar Wamenag.

Untuk keperluan kontrak di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) yang harus segera diselesaikan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji. "Kontrak di Armuzna sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain," kata Syafii.

Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. "Untuk itu, kami bersama DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut," ujarnya. (Ant/Obi)-f

## KPK

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIPATF.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyusunan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

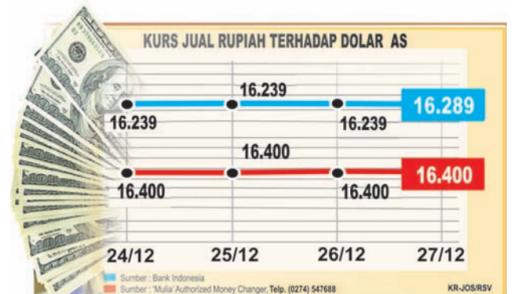
Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar

pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan

yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. (Ant)-f



Prakiraan Cuaca		Sabtu, 28 Desember 2024				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95